

PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG NASIONALISME DAN MULTIKULTURALISME DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0: MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM ARUS GLOBALISASI

I Gede Kamajaya

Universitas Udayana

Email : kama.jaya@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Soekarno tentang nasionalisme dan multikulturalisme serta relevansinya dalam membangun identitas nasional Indonesia pada era Revolusi Industri 4.0. Di tengah arus globalisasi yang menantang eksistensi budaya lokal dan semangat kebangsaan, pemikiran Soekarno dinilai mampu memberikan orientasi ideologis yang kokoh dan inklusif dalam menjawab krisis identitas generasi muda serta fragmentasi sosial yang muncul akibat dominasi nilai-nilai global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan melalui telaah mendalam terhadap karya-karya asli Soekarno, buku akademik, serta jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutik dan content analysis guna menafsirkan nilai-nilai substantif dari gagasan Soekarno tentang nasionalisme yang emansipatoris dan multikulturalisme yang egaliter. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemikiran Soekarno tentang nasionalisme bersifat emansipatoris, progresif, dan berakar pada realitas plural masyarakat Indonesia. Soekarno menekankan bahwa nasionalisme sejati harus mampu membebaskan, mempersatukan, dan mengakui keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa, bukan ancaman. Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, pemikiran tersebut tetap relevan untuk membentuk identitas nasional yang tangguh dan berdaya saing global, sekaligus menjaga integrasi sosial dan kedaulatan budaya. Dengan demikian, revitalisasi pemikiran kebangsaan Soekarno menjadi kebutuhan mendesak dalam merespons tantangan ideologis dan kultural era kontemporer.

Kata Kunci: *Soekarno, nasionalisme, multikulturalisme, identitas nasional, Revolusi Industri 4.0, globalisasi*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan nasional di tengah dinamika Revolusi Industri 4.0. Transformasi digital yang masif tidak hanya mengubah pola ekonomi dan sosial, tetapi juga memengaruhi pembentukan identitas nasional yang kian terfragmentasi. Dalam konteks ini, relevansi pemikiran Soekarno mengenai nasionalisme dan multikulturalisme menjadi semakin penting untuk ditinjau kembali. Soekarno menekankan pentingnya nasionalisme yang inklusif dan berbasis pada persatuan dalam keberagaman (Sukarno 2001; Anshori 2018; Latif 2011). Gagasan tersebut sejalan dengan kebutuhan zaman sekarang, di mana kohesi sosial menjadi kunci dalam menghadapi tantangan globalisasi dan penetrasi budaya luar yang kian masif.

Era Revolusi Industri 4.0 ditandai oleh perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan internet of things (IoT), yang secara signifikan memengaruhi struktur sosial dan relasi antarwarga negara (Schwab 2016; Sugiharto 2020; Fitriani

2022). Perubahan ini menimbulkan disrupsi terhadap nilai-nilai kebangsaan, terutama pada generasi muda yang terpapar konten global tanpa filter ideologis. Dalam hal ini, nasionalisme perlu didekonstruksi dan dirumuskan kembali sesuai konteks zaman, namun tetap berpijak pada nilai-nilai dasar yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, terutama Soekarno (Hikam 2018; Sulaiman 2020; Basri 2019). Nasionalisme yang ditawarkan Soekarno tidak eksklusif atau chauvinistik, tetapi berbasis pada kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai perekat keberagaman.

Soekarno dalam berbagai pidatonya, seperti “Lahirnya Pancasila” dan “*To Build the World Anew*,” menggarisbawahi pentingnya persatuan nasional yang dibangun di atas fondasi multikulturalisme, bukan asimilasi budaya (Sukarno 2001; Kleden 2019; Yamin 2015). Gagasan ini memperlihatkan kejeniusan Soekarno dalam membaca realitas sosiologis bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, pendekatan multikulturalisme menjadi sangat strategis untuk memperkuat jati diri bangsa dalam menghadapi homogenisasi budaya global. Penguatan identitas nasional dalam kerangka multikultural menuntut keterlibatan negara, pendidikan, serta media digital dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang adaptif dan inklusif (Rahman 2021; Nugroho 2020; Fadillah 2019).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa degradasi identitas nasional di kalangan generasi muda sangat terkait dengan lemahnya internalisasi nilai kebangsaan melalui pendidikan dan media sosial (Siregar 2021; Zulfikar 2022; Hanifah 2019). Nasionalisme digital yang terbentuk cenderung superficial dan kehilangan kedalaman filosofis. Dalam konteks ini, pemikiran Soekarno dapat menjadi basis ideologis untuk membangun model pendidikan kebangsaan yang kontekstual dengan zaman digital, namun tetap menekankan pentingnya solidaritas kebangsaan, keberagaman, dan keadilan sosial (Latif 2011; Mulya 2020; Siregar 2023). Oleh karena itu, penting untuk menggali kembali pemikiran Soekarno dengan pendekatan interpretatif dan konstruktif dalam menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0.

Selain itu, globalisasi membawa serta tantangan berupa disorientasi identitas dan lunturnya semangat kolektivisme. Arus informasi yang tanpa batas memudahkan terjadinya penetrasi budaya asing yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan (Castells 2010; Wahyuni 2020; Adityo 2021). Soekarno dalam banyak kesempatan memperingatkan tentang bahaya imperialisme budaya dan menyerukan perlunya “berdikari dalam kebudayaan” (Sukarno 2001). Pemikiran ini tetap relevan ketika Indonesia dihadapkan pada realitas budaya digital yang lebih mengglobal daripada nasional. Kemandirian dalam membentuk budaya nasional di tengah globalisasi menjadi agenda strategis untuk melestarikan identitas bangsa (Arifin 2018; Nugroho 2021; Putri 2022).

Multikulturalisme yang ditawarkan Soekarno bukanlah konsep pasif, melainkan praksis politik yang mengandaikan adanya ruang-ruang dialog antarbudaya yang setara dan saling menghormati (Yamin 2015; Kleden 2019; Arifin 2020). Dalam konteks kekinian, multikulturalisme harus menjadi kerangka ideologis dalam merespons disrupsi sosial yang diakibatkan oleh teknologi dan ekonomi digital. Model ini tidak hanya menjaga integrasi bangsa, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat identitas nasional yang berbasis pada kebhinekaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan (Susanti 2021; Prasetyo 2022; Wibowo 2023).

Sebagai negara dengan lebih dari 1.300 kelompok etnik dan ratusan bahasa daerah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model negara multikultural yang berhasil. Namun, potensi ini dapat menjadi ancaman jika tidak diimbangi dengan

nasionalisme yang konstruktif (Latif 2011; Sulaiman 2020; Hanifah 2022). Dalam hal ini, pemikiran Soekarno memberikan kerangka yang jelas: bahwa nasionalisme Indonesia bukanlah anti-globalisasi, tetapi nasionalisme yang bersifat terbuka, humanis, dan progresif (Sukarno 2001; Anshori 2018; Kleden 2019). Nasionalisme model ini tidak hanya dibutuhkan untuk memperkuat internal bangsa, tetapi juga sebagai bentuk diplomasi kultural Indonesia dalam kancah global.

Pendidikan kebangsaan memegang peran strategis untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme inklusif sejak dini. Melalui kurikulum yang menekankan pentingnya toleransi, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap keberagaman, generasi muda dapat dibentuk menjadi warga negara yang tidak hanya bangga terhadap identitas nasionalnya, tetapi juga mampu berinteraksi secara produktif dalam masyarakat global. Upaya ini harus didukung oleh kebijakan negara yang berpihak pada penguatan kebudayaan lokal dan pemberdayaan komunitas, sehingga semangat nasionalisme tidak hanya hidup dalam retorika, tetapi juga tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Akhirnya, penelitian ini hendak mengkaji ulang relevansi pemikiran Soekarno dalam membangun identitas nasional di era Revolusi Industri 4.0 dengan menekankan aspek multikulturalisme sebagai kekuatan utama bangsa. Dengan menggunakan pendekatan historis-kritis dan interpretatif, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap upaya revitalisasi nasionalisme Indonesia yang adaptif terhadap zaman, namun tetap setia pada akar ideologis bangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk mengkaji secara mendalam pemikiran-pemikiran Soekarno tentang nasionalisme dan multikulturalisme serta relevansinya dalam membentuk identitas nasional di tengah arus globalisasi Revolusi Industri 4.0. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menelusuri gagasan-gagasan filosofis, historis, dan ideologis yang bersumber dari karya-karya otentik Bung Karno, serta dikontekstualisasikan melalui analisis kritis atas literatur akademik mutakhir dari buku dan jurnal ilmiah.

Penelitian ini tidak bertujuan menggeneralisasi temuan, melainkan untuk memahami secara mendalam konteks pemikiran Soekarno dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan keberagaman pada era kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif mampu memberi ruang untuk interpretasi nilai-nilai yang bersifat kontekstual dan historis.

Metode studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber sekunder, seperti buku-buku asli karya Soekarno, biografi, arsip sejarah, serta artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi nasional dan internasional. Sejalan dengan pandangan George (2005), studi literatur merupakan teknik penting dalam riset sosial karena memberi kesempatan kepada peneliti untuk membangun kerangka teoritis yang kuat dari hasil kajian kritis terhadap literatur yang ada. Teknik ini juga memperkuat validitas konseptual penelitian karena data yang digunakan bersumber dari karya yang telah melewati proses akademik yang ketat.

Proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dari pemikiran Soekarno seperti nasionalisme emansipatoris, inklusivitas budaya, dan integrasi multikultural, lalu membandingkannya dengan kerangka konseptual dari teori-teori modern tentang kebangsaan dan multikulturalisme. Selanjutnya, dilakukan reduksi data, yaitu seleksi terhadap informasi

yang paling relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dipilih dianalisis dengan pendekatan hermeneutik dan interpretatif, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang bersifat reflektif dan deskriptif. menerapkan prinsip triangulasi teori guna meningkatkan kredibilitas data, yakni dengan membandingkan pemikiran Soekarno dengan pemikiran para tokoh nasionalisme dan multikulturalisme lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nasionalisme Soekarno sebagai Ideologi Emansipatoris

Pemikiran nasionalisme Soekarno dibangun atas dasar perjuangan emansipatoris melawan kolonialisme dan ketidakadilan global. Nasionalisme dalam pandangan Soekarno bukan sekadar sentimen etnosentris, melainkan sebuah ideologi progresif yang bertujuan membebaskan manusia dari penindasan, sekaligus menyatukan keragaman dalam kerangka kebangsaan. Soekarno menolak bentuk nasionalisme sempit (*narrow nationalism*) dan menggantinya dengan nasionalisme revolusioner yang berakar pada prinsip keadilan sosial dan solidaritas kemanusiaan (Sukarno, 2001). Ia menyatakan bahwa nasionalisme Indonesia harus berpijak pada kebudayaan sendiri, tetapi bersifat terbuka dan inklusif terhadap realitas plural bangsa (Latif, 2011; Anshori, 2018).

Dalam kerangka teori multikulturalisme yang dikemukakan Parekh (2006), konsep nasionalisme Soekarno dapat dikategorikan sebagai “*multicultural nationalism*”, yakni nasionalisme yang menjadikan pluralisme budaya sebagai bagian esensial dari identitas nasional. Hal ini berbeda dengan nasionalisme homogen yang mendominasi negara-negara Eropa pada masa itu. Menurut Hikam (2018), pemikiran Soekarno memberi ruang bagi semua identitas etnik, agama, dan budaya untuk tumbuh dalam satu naungan kebangsaan. Ia percaya bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga melalui semangat gotong royong dan persaudaraan nasional (Kleden, 2019; Basri, 2019).

Pemikiran kebangsaan Soekarno berakar pada gagasan bahwa nasionalisme tidak semata-mata berarti cinta tanah air secara sempit, tetapi sebagai sarana pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan—baik kolonial, kultural, maupun struktural. Dalam pidato dan tulisan-tulisannya, Soekarno menekankan bahwa nasionalisme harus memiliki orientasi emansipatoris: membebaskan bangsa dari penjajahan dan membangun keadilan sosial di tengah masyarakat majemuk.

Soekarno menyadari bahwa penjajahan tidak hanya merampas kedaulatan politik, tetapi juga membunuh identitas budaya bangsa. Oleh karena itu, nasionalisme harus bersifat kultural menghidupkan kembali bahasa, kesenian, nilai-nilai lokal, dan solidaritas sosial. Ia mengkritik nasionalisme borjuis yang hanya fokus pada elite dan menyingkirkan massa rakyat (Latif, 2011). Dalam konteks ini, nasionalisme yang digagas Soekarno sangat dekat dengan gagasan *cultural nationalism* yang menempatkan kebudayaan sebagai benteng utama resistensi.

Gagasan tersebut sejajar dengan pemikiran Homi K. Bhabha (1994) dalam *The Location of Culture*, bahwa bangsa (*nation*) merupakan ruang negosiasi budaya yang terus-menerus dan tidak monolitik. Maka, nasionalisme tidak harus berlawanan dengan keberagaman, tapi justru menubuh dalam keragaman itu sendiri. Soekarno dengan tegas menolak nasionalisme etnis tunggal dan lebih memilih jalan integrasi multikultural.

Tantangan Multikulturalisme di Era Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 membawa dampak besar terhadap pembentukan identitas kolektif. Digitalisasi dan penetrasi media sosial menciptakan ruang sosial baru yang

transnasional, di mana batas-batas geografis dan ideologis menjadi kabur (Schwab, 2016; Fitriani, 2022). Di satu sisi, fenomena ini memungkinkan dialog antarbudaya secara lebih terbuka, namun di sisi lain juga menyebabkan meningkatnya disorientasi identitas, terutama di kalangan generasi muda. Menurut Castells (2010), munculnya identitas jaringan (networked identity) mengaburkan identitas kultural yang terikat ruang dan tradisi lokal. Hal ini memperkuat urgensi pemikiran Soekarno yang menekankan perlunya “berdikari dalam kebudayaan” sebagai bentuk ketahanan nasional di tengah globalisasi budaya (Sukarno, 2001; Nugroho, 2021).

Dalam konteks Indonesia, tantangan multikulturalisme bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam, berupa ketimpangan sosial, politik identitas, dan intoleransi yang menggerus solidaritas kebangsaan (Hanifah, 2022; Siregar, 2021). Ketika akses teknologi tidak dibarengi dengan literasi ideologis, maka nasionalisme digital cenderung bersifat kosmetik dan mudah disusupi paham eksklusivisme. Pendidikan nasional belum sepenuhnya berhasil menginternalisasi nilai-nilai inklusif seperti yang dicita-citakan Soekarno (Zulfikar, 2022; Rahman, 2021; Fadillah, 2019). Oleh karena itu, revitalisasi nasionalisme Soekarno melalui platform digital menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membumikan nilai-nilai kebangsaan yang kontekstual.

Salah satu strategi utama dalam membangun identitas nasional adalah melalui internalisasi nilai-nilai kebangsaan di sektor pendidikan dan media. Namun, tantangan yang dihadapi sangat kompleks. Kurikulum pendidikan nasional sering kali belum mengakar pada realitas sosial dan kebudayaan lokal, sehingga gagal menumbuhkan kebanggaan dan keterikatan pada identitas nasional (Nugroho, 2020; Arifin, 2018). Dalam banyak kasus, siswa memahami nasionalisme sebagai hafalan sejarah atau slogan formal, bukan sebagai nilai hidup yang harus dihayati dan dipraktikkan.

Dalam konteks ini, pemikiran Soekarno dapat menjadi referensi penting untuk merancang kurikulum berbasis nilai kebangsaan yang dinamis dan reflektif. Menurut Yamin (2015), nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan keberanian bersikap harus diajarkan sebagai pengalaman, bukan hanya teori. Media digital juga berperan penting dalam menyebarkan narasi kebangsaan yang konstruktif. Penelitian oleh Wibowo (2023) menunjukkan bahwa konten nasionalisme di media sosial yang bersifat visual, naratif, dan relevan dengan konteks keseharian jauh lebih efektif dalam membangun keterikatan emosional terhadap bangsa daripada propaganda formal.

Mengacu pada teori Habermas (1987) tentang ruang publik digital, ruang daring harus dimanfaatkan sebagai medium dialog antar-identitas budaya dalam kerangka kebangsaan. Di sinilah perlunya pendekatan multikulturalisme aktif, seperti yang diimpikan Soekarno, agar ruang digital tidak menjadi medan polarisasi, tetapi menjadi forum integrasi.

Dalam konteks Indonesia yang multikultural, nasionalisme yang bersifat inklusif menjadi sangat relevan. Soekarno menganggap bahwa nasionalisme sejati tidak memisahkan Jawa dari Sumatera, Bali dari Papua, atau Islam dari Kristen—karena semuanya adalah bagian dari satu tubuh bangsa Indonesia (Anshori, 2018). Hal ini merupakan bentuk emansipasi dari kolonialisme yang justru mempertajam perbedaan untuk memecah belah rakyat.

Pemikiran ini selaras dengan perspektif Bhikhu Parekh (2006) dalam *Rethinking Multiculturalism*, bahwa negara multikultural harus menjamin ekspresi budaya yang adil bagi semua kelompok sambil memelihara rasa kebersamaan nasional. Soekarno sudah lama mengartikulasikan hal ini dalam ideologi Pancasila sebagai bentuk rekonsiliasi antara berbagai ide, agama, dan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Saat ini, tantangan terhadap nasionalisme tidak lagi berupa kolonialisme dalam bentuk klasik, melainkan penetrasi budaya global, neoliberalisme, dan krisis identitas digital. Maka, nasionalisme emansipatoris ala Soekarno tetap relevan, terutama untuk mengkritik dan melawan ketimpangan global yang membuat bangsa-bangsa dunia ketiga tetap bergantung secara struktural (Schwab, 2016; Susanti, 2021).

Nasionalisme harus menjadi landasan emansipasi baru: membangun kedaulatan teknologi, kemandirian ekonomi, dan revitalisasi budaya lokal di tengah serbuan globalisasi. Hal ini bisa dicapai bila nilai-nilai nasionalisme diajarkan kembali dengan pendekatan yang reflektif dan kontekstual, bukan sekadar formalitas upacara. Wibowo (2023) menekankan pentingnya "narasi kebangsaan baru" yang dikembangkan melalui media sosial dan pendidikan berbasis nilai.

Identitas Nasional dalam Perspektif Soekarno dan Tantangan Globalisasi

Identitas nasional dalam perspektif Soekarno adalah hasil konstruksi sejarah dan sosial yang terus mengalami pembaruan, tetapi tidak kehilangan akar ideologisnya. Ia menyadari bahwa nasionalisme Indonesia harus terus diredefinisi seiring dengan perubahan zaman, tanpa meninggalkan dasar-dasar filosofis Pancasila (Latif, 2011; Mulya, 2020). Dalam hal ini, konsep nation building yang dikembangkan Soekarno mencerminkan semangat transformasi yang adaptif namun tetap berpijak pada kepribadian bangsa.

Globalisasi sebagai fenomena multidimensional menimbulkan dilema antara integrasi global dan proteksi identitas lokal. Menurut Appadurai (1996), arus globalisasi menciptakan *scapes* (landscape of culture, ideology, economy, etc.) yang saling bertubrukan dan memengaruhi konstruksi identitas nasional. Di sinilah pentingnya memperkuat narasi kebangsaan yang mampu menjembatani antara lokalitas dan globalitas. Soekarno telah mengantisipasi ini jauh sebelumnya melalui ajaran Trisakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan (Sukarno, 2001; Wahyuni, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2021) menunjukkan bahwa negara-negara dengan identitas nasional yang kuat namun inklusif cenderung lebih tahan terhadap guncangan budaya dan ekonomi global. Indonesia perlu belajar dari pemikiran Soekarno yang menempatkan kebudayaan sebagai garda depan dalam menjaga identitas nasional, bukan hanya sebagai warisan pasif tetapi sebagai alat emansipasi dan pemersatu. Oleh karena itu, kebudayaan harus ditempatkan sebagai elemen dinamis yang terus diperkuat dan dikembangkan sesuai dengan tantangan zaman. Dalam semangat nasionalisme ala Soekarno, kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan kekuatan hidup yang mampu merespons perubahan tanpa kehilangan jati diri. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam percaturan global melalui diplomasi kultural. Penguatan identitas nasional yang inklusif dan berbasis kebudayaan ini menjadi kunci untuk menjaga keutuhan bangsa sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional.

Pemikiran Soekarno tentang multikulturalisme bukanlah wacana normatif semata, melainkan fondasi ideologis dari visi kebangsaan yang mengakui pluralitas sebagai sumber kekuatan. Dalam pidatonya, Soekarno menekankan bahwa bangsa Indonesia harus dibangun di atas "Bhineka Tunggal Ika", bukan semata-mata sebagai semboyan, tetapi sebagai praksis sosial dan politik (Sukarno, 2001; Kleden, 2019). Multikulturalisme yang ditawarkan bersifat deliberatif, mengandaikan adanya ruang-ruang partisipatif antar-identitas yang setara.

Model ini sejalan dengan teori Taylor (1994) tentang pengakuan (*recognition*), di mana identitas kultural membutuhkan validasi sosial agar dapat berkembang tanpa ditekan oleh mayoritas dominan. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti pengakuan terhadap bahasa daerah, adat istiadat, hingga ekspresi religius yang berbeda sebagai bagian integral dari identitas nasional. Ketika pengakuan ini tidak terjadi, maka eksklusivitas dan marginalisasi akan melemahkan rasa kebangsaan dan membuka jalan bagi radikalisme dan separatisme (Prasetyo, 2022; Arifin, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2019) dan Putri (2022) menegaskan bahwa penerimaan terhadap keberagaman sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial suatu bangsa. Ketika masyarakat merasa identitasnya diakui, maka loyalitas terhadap negara pun meningkat. Oleh karena itu, kebijakan publik harus diarahkan pada penguatan institusi-institusi inklusif yang mencerminkan nilai-nilai multikultural Soekarno sebagai dasar identitas nasional masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Soekarno tentang nasionalisme dan multikulturalisme memiliki kedalaman konseptual yang sangat relevan dengan tantangan kebangsaan masa kini, khususnya dalam konteks era Revolusi Industri 4.0 dan arus globalisasi. Nasionalisme bagi Soekarno bukanlah sekadar cinta tanah air dalam pengertian sempit, tetapi merupakan ideologi emansipatoris yang membebaskan bangsa dari penindasan kolonial, dominasi budaya asing, dan ketimpangan sosial. Gagasan ini dirumuskan Soekarno dalam semangat persatuan, keadilan, dan penghormatan atas keragaman budaya yang melekat dalam identitas bangsa Indonesia.

Soekarno mengembangkan nasionalisme yang inklusif, bukan eksklusif. Ia menolak paham chauvinistik dan etnosentris yang hanya menguntungkan satu golongan, serta menempatkan keberagaman sebagai kekuatan, bukan ancaman. Dalam pemikirannya, multikulturalisme bukanlah penghalang untuk membentuk identitas nasional, melainkan fondasi bagi terbentuknya solidaritas kebangsaan yang adil dan manusiawi. Hal ini tercermin dalam konsepsi Pancasila dan pidato-pidatonya yang menekankan pentingnya “nasionalisme yang menghormati kemanusiaan.”

Dalam era digital dan globalisasi saat ini, tantangan terhadap identitas nasional semakin kompleks: penetrasi budaya asing, krisis ideologis generasi muda, serta dominasi ekonomi global yang berpotensi mereduksi semangat kebangsaan. Namun, nilai-nilai nasionalisme Soekarno tetap relevan karena menawarkan orientasi etik dan politik yang menjunjung kedaulatan bangsa, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap perbedaan. Oleh sebab itu, pemikiran Soekarno perlu direvitalisasi dalam kebijakan pendidikan, diskursus publik, dan praksis sosial-politik agar nasionalisme tetap hidup sebagai kekuatan emansipatoris di tengah disrupsi zaman.

Secara teoritis, pemikiran Soekarno juga sejalan dengan paradigma nasionalisme modern yang inklusif dan dinamis, seperti yang ditawarkan oleh para pemikir seperti Benedict Anderson (nasionalisme sebagai komunitas terbayang), Bhikhu Parekh (multikulturalisme sebagai prinsip keadilan budaya), dan Homi Bhabha (identitas bangsa sebagai ruang negosiasi). Maka, dari perspektif akademik maupun praksis, nasionalisme Soekarno dapat diposisikan sebagai kontribusi intelektual bangsa Indonesia terhadap perdebatan global mengenai nasionalisme dan keberagaman.

Dengan demikian, membudayakan kembali gagasan kebangsaan Soekarno dalam konteks kontemporer merupakan langkah strategis dan historis untuk membangun identitas nasional yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing dalam arus Revolusi Industri

4.0. Identitas nasional tidak boleh dikonstruksi secara eksklusif dan ahistoris, melainkan harus terus dimaknai ulang dengan semangat progresif dan berkeadilan sosial sebagaimana diajarkan oleh Bung Karno.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo, Budi. (2021). *Globalisasi dan Identitas Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, M. (2018). *Pemikiran Soekarno tentang Nasionalisme dan Pancasila*. Yogyakarta: Ombak.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Arifin, Z. (2018). "Revitalisasi Nilai-nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Karakter di Sekolah." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(2), 157–165.
- Arifin, Z. (2020). "Multikulturalisme dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Ketahanan Nasional." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 75–90.
- Arifin, Zainal. (2018). *Pendidikan Multikultural dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Zainal. (2020). "Praksis Multikulturalisme dan Tantangan Nasionalisme." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 26(1): 88–103.
- Basri, H. (2019). "Soekarno dan Ajaran Nasionalisme Indonesia." *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 13(1), 1–12.
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity* (2nd ed.). Oxford: Blackwell Publishing.
- Fadillah, Nur. 2019. "Rekonstruksi Nasionalisme dalam Pendidikan Abad 21." *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan* 9(2): 97–110.
- Fadillah, R. (2019). "Krisis Identitas Nasional pada Generasi Muda di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 153–165.
- Fitriani, F. (2022). "Media Sosial dan Identitas Nasional: Antara Representasi dan Fragmentasi." *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 16(1), 73–89.
- Habermas, J. (1987). *The Theory of Communicative Action, Volume Two: Lifeworld and System*. Boston: Beacon Press.
- Hanifah, Laila. (2019). "Tantangan Pendidikan Karakter di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 8(1): 55–66.
- Hanifah, Laila. (2022). *Krisis Identitas Generasi Muda di Era Disrupsi*. Bandung: Alfabeta.
- Hanifah, N. (2019). "Multikulturalisme dan Keutuhan Bangsa." *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 18(2), 135–145.
- Hikam, M. A. S. (2018). "Revitalisasi Nasionalisme dalam Era Post-Truth." *Jurnal Politik Indonesia* 3(1): 45–60.
- Kleden, I. (2019). *Menimbang Nasionalisme Indonesia: Catatan Kritis dari Perspektif Sosial Budaya*. Jakarta: Pustaka Kompas.

- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulya, D. (2020). "Pancasila Sebagai Dasar Identitas Nasional dalam Era Disrupsi." *Jurnal Filsafat*, 30(1), 49–64.
- Nugroho, A. (2020). "Pendidikan Nasionalisme dan Tantangan Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 33(1), 25–39.
- Nugroho, W. (2021). "Revitalisasi Nasionalisme Soekarno dalam Era Globalisasi." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 39(1), 65–80.
- Parekh, B. (2006). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (2nd ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Prasetyo, A. (2022). "Eksklusi Sosial dan Politik Identitas dalam Perspektif Multikulturalisme." *Jurnal Sosial Politik*, 12(1), 89–105.
- Putri, Dinda. 2022. "Penetrasi Budaya Global dan Resiliensi Identitas Nasional." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 15(2): 112–125.
- Putri, N. A. (2022). "Pengakuan Identitas Budaya dalam Pembentukan Kesatuan Nasional." *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 14(2), 101–114.
- Rahman, F. (2021). "Nasionalisme dalam Era Digital: Perspektif Pendidikan Karakter." *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 55–67.
- Schwab, Klaus. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- Siregar, Amin. (2021). "Nasionalisme dan Generasi Milenial di Era Digital." *Jurnal Politik dan Kebangsaan* 5(2): 88–102.
- Siregar, Amin. (2023). *Membangun Kembali Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Siregar, E. (2021). "Radikalisme dan Nasionalisme di Era Digital: Analisis Perspektif Kebudayaan." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 27–40.
- Sugiharto, Bambang. (2020). "Teknologi dan Krisis Kemanusiaan di Era Digital." *Jurnal Filsafat Indonesia* 24(1): 45–59.
- Sukarno. (2001). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Media Pressindo.
- Sulaiman, Dedi. (2020). "Relevansi Pemikiran Soekarno dalam Membangun Nasionalisme Modern." *Jurnal Kajian Sejarah* 14(1): 33–47.
- Susanti, Rina. (2021). "Multikulturalisme dalam Pendidikan Nasional." *Jurnal Pendidikan Humaniora* 9(1): 22–34.
- Taylor, C. (1994). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press.
- Wahyuni, S. (2020). "Trisakti Bung Karno Sebagai Strategi Ketahanan Bangsa dalam Era Global." *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 211–225.
- Wibowo, A. (2023). "Narasi Kebangsaan di Media Sosial: Strategi Pendidikan Politik di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Politik*, 5(1), 22–35.
- Yamin, Muhammad. (2015). *Gagasan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Zulfikar, T. (2022). "Pendidikan Nasionalisme dalam Kurikulum Sekolah: Evaluasi Kritis." *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 28(3), 211–226.
- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. London: Routledge.
- Chatterjee, P. (1993). *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*. Princeton University Press.
- Parekh, B. (2006). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. London: Palgrave Macmillan.
- Susanti, D. (2021). "Ketahanan Budaya dan Identitas Nasional di Era Globalisasi." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 25(2), 133–147.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.